

LAPORAN MONEV BULANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**PEMKAB
PADANG PARIAMAN**



**KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2025**

KATA PENGANTAR

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman telah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pariaman, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



SISKA PRIMA DONA, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	3
D. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	3
E. Susunan Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis.....	5
B. Perjanjian Kinerja	6
C. Indikator Kinerja	7
D. Standar Pelayanan.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP.....	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja setiap perangkat daerah. Proses monitoring dan evaluasi ini merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi, misi, dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, setiap perangkat daerah dapat melakukan refleksi terhadap kinerja yang telah dicapai, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, dan selanjutnya melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Laporan monitoring dan evaluasi tahunan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini mencakup analisis komprehensif yang meliputi capaian kinerja, realisasi anggaran, indikator kinerja utama, serta berbagai capaian strategis lainnya dari masing-masing perangkat daerah.

Keberhasilan monitoring dan evaluasi kinerja sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintah daerah. Proses ini memerlukan pendekatan yang sistematis, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan berbagai instrumen pengukuran kinerja yang kredibel dan terukur. Setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan target-target strategis ke dalam indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu yang jelas.

Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu fokus utama dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja saat ini. Penggunaan platform digital dan sistem informasi terintegrasi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja secara real-time dan komprehensif. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan proses evaluasi, tetapi juga mendorong terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

Kompleksitas tantangan pembangunan daerah menuntut pendekatan holistik dalam monitoring dan evaluasi kinerja. Tidak hanya sekadar mengukur capaian target kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas, inovasi, dan dampak nyata dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu, diperlukan kerangka penilaian yang mampu menangkap nuansa-nuansa strategis di berbagai bidang pembangunan, mulai dari pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi lokal.

Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, termasuk masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, menjadi elemen kritis dalam mewujudkan monitoring dan evaluasi yang partisipatif dan akuntabel. Melalui mekanisme umpan balik dan keterbukaan informasi, setiap tahapan proses evaluasi kinerja dapat dikawal secara kolektif, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, laporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah untuk menghasilkan dokumen evaluasi komprehensif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian kinerja, tantangan, dan rekomendasi perbaikan bagi setiap perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun tujuan spesifik dari kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengukur Tingkat Capaian Kinerja Menilai secara objektif dan komprehensif tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis masing-masing perangkat daerah. Penilaian ini mencakup analisis mendalam terhadap indikator kinerja utama, realisasi program, dan keluaran (output) yang dihasilkan, serta dampak nyata dari setiap intervensi kebijakan yang dilaksanakan.
2. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja perangkat daerah. Hal ini mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi program dan kegiatan, sehingga dapat dirumuskan strategi mitigasi dan pengembangan kapasitas yang tepat.
3. Merumuskan Rekomendasi Perbaikan Menghasilkan rekomendasi strategis dan operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas perencanaan, dan optimalisasi kinerja perangkat daerah pada periode berikutnya. Rekomendasi ini bersifat konstruktif dan berbasis pada temuan empiris hasil monitoring dan evaluasi.
4. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Mewujudkan mekanisme pertanggungjawaban kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Proses ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
5. Mendukung Perencanaan Strategis Menyediakan basis informasi dan evidensi yang komprehensif untuk mendukung proses perencanaan strategis di masa mendatang. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan

sebagai referensi dalam penyusunan rencana pembangunan, penentuan prioritas program, dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Mendorong proses pembelajaran organisasional (organizational learning) melalui refleksi kritis terhadap kinerja yang telah dicapai. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, setiap perangkat daerah dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan mengadaptasi berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
7. Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Daerah Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan perangkat daerah secara konsisten terarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi berperan sebagai instrumen untuk menjaga keselarasan antara rencana strategis, implementasi program, dan hasil yang dicapai.

Dengan demikian, laporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan merupakan instrumen strategis untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2021 tentang SOTK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. SUSUNAN ORGANISASI

1. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan wewenang Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar.
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : Penyusunan perencanaan bidang-bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang-bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub bagian, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan PUG;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Perempuan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Anak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Berikut adalah indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran DinsosP3A Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	45,90	46,35	46,80	47,85	48,17	45,90
			Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	6	5	4	3	2	1
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama (500-600)	Pratama (500-600)	Madya (601-700)	Madya (601-700)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan 2. Persentase PPKS Mandiri	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	87	88	89	90	91	92
			Meningkatnya Keterlibatan masyarakat dalam penanganan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanganan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	%	41	44	47	50	53	56
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	100

			Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100
3.	Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai LPPD dan Opini WTP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat.	Angka	A	A	A	A	A	A

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang disusun dan disepakati antara atasan langsung dan pejabat yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Perjanjian ini memuat kesepakatan mengenai sasaran, tujuan, dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap pejabat di lingkungan organisasi, serta sebagai dasar dalam penilaian kinerja yang objektif dan transparan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Dengan adanya perjanjian ini, setiap pejabat memiliki kejelasan mengenai target yang harus dicapai, serta standar kinerja yang diharapkan. Hal ini juga memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas.

Dalam perjanjian ini, disepakati beberapa hal penting, seperti sasaran strategis, indikator kinerja, target pencapaian, serta waktu pencapaian yang harus dilaksanakan oleh pejabat terkait. Sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja biasanya mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut disusun secara terukur dan terperinci, agar dapat dijadikan acuan yang jelas bagi setiap pejabat yang terlibat.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai pencapaian kinerja, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui perjanjian ini, diharapkan adanya peningkatan disiplin kerja, kinerja yang lebih terarah, serta pencapaian target yang optimal, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada tercapainya tujuan dan visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berikut dokumen Perjanjian Kinerja DinsosP3A Tahun 2024:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja DinsosP3A Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja (sampai dengan Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	48,17	Angka
2.	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	2	Angka
3.	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nindya (701-800)	Angka
4.	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	91	Angka
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	53	Persen
6.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	Persen
7.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	Persen
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	(80,30) A	Angka

C. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian dan kinerja suatu daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Indikator ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. IKD digunakan untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data.

Indikator Kinerja Daerah pada dasarnya mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kinerja daerah dalam beberapa bidang, seperti keuangan, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya indikator ini, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, serta memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembangunan jika diperlukan.

Tabel 3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada DinasosP3A Tahun 2025

1. Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Daerah	Target Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	Persentase PPKS Mandiri	28	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah PPKS Keseluruhan}}$	28	100	DinsosP3A
2	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	80	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani} \times 100\%}{\text{Jumlah PPKS Keseluruhan}}$	80,5	100	DinsosP3A
3	Persentase Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100	%	$\frac{\text{Jumlah TMT yang terpelihara} \times 100\%}{\text{Jumlah TMT yang ada}}$	100	100	DinsosP3A
4	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan	85	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang diberi Bantuan} \times 100\%}{\text{Jumlah PPKS yang ada}}$	60	100	DinsosP3A
5	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	58	%	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek} \times 100\%}{\text{Jumlah PPKS yang ada}}$	60	100	DinsosP3A
6	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100	%	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam yg dibantu} \times 100\%}{\text{Jumlah korban Bencana alam yang ada}}$	100	100	DinsosP3A
7	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	92	%	$\frac{\text{PPKS yang memperoleh bantuan sosial} \times 100\%}{\text{Jumlah PPKS yang ada}}$	92.5	100	DinsosP3A
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	%	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Sosial yg dibantu} \times 100\%}{\text{Jumlah korban Bencana Sosial yang ada}}$	100	100	DinsosP3A
9	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	8	Angka	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	7	87,5	DinsosP3A

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	14	%	$\frac{\text{Jumlah penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak} \times 100}{\text{Jumlah Perempuan dan Anak keseluruhan}}$	0,022	100	DinsosP3A
2	Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	48	%	$\frac{\text{Jumlah program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak yg Selarah} \times 100\%}{\text{Jumlah program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak yg ada}}$	49	100	DinsosP3A
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	70	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga pemerintah} \times 100 \%}{\text{Jumlah tenaga kerja Perempuan yg ada}}$	36,59	52,27	DinsosP3A
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	1	%	$\frac{\text{Jumlah Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan yang ada di partai politik}}$			DinsosP3A
5	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	37	%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi perempuan di lembaga swasta} \times 100 \%}{\text{Jumlah tenaga kerja Perempuan yg ada}}$	42,26	100	DinsosP3A
6	Rasio KDRT	0,74	Ratio		1,57	47,13	DinsosP3A
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	%	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja dibawah umur} \times 100\%}{\text{Jumlah anak 0-18 tahun}}$			DinsosP3A
8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	57	Angka	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan 19-60 tahun}}$	53,44	93,75	DinsosP3A

9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan dan anak keseluruhan}}$	100	100	DinsosP3A
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan dan anak keseluruhan}}$	100	100	DinsosP3A
11	Cakupan perempuan dan anak korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan bantuan hukum} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan dan anak keseluruhan}}$	100	100	DinsosP3A
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Pemulangan} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan dan anak keseluruhan}}$	100	100	DinsosP3A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan reintegrasi sosial} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan dan anak keseluruhan}}$	100	100	DinsosP3A
14	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan pengaduan} \times 100\%}{\text{Jumlah perempuan dan anak keseluruhan}}$	100	100	DinsosP3A

D. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DINASOSP3A

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya yang berada di daerah, mendapatkan pelayanan yang layak dan berkualitas sesuai dengan hak mereka sebagai bagian dari negara. SPM ini berlaku pada berbagai bidang pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan lain-lain. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial merujuk pada standar yang ditetapkan untuk berbagai sektor pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Setiap bidang memiliki standar yang spesifik, yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4

Standar Pelayanan Minimal (SPM) DinsosP3A Tahun 2025

No	Indikator SPM	Target Kinerja	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	125	$\frac{\text{Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti} \times 100\%}{\text{Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas keseluruhan}}$	DinsosP3A
2.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	119	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti} \times 100\%}{\text{Jumlah anak terlantar keseluruhan}}$	DinsosP3A
3.	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	98	$\frac{\text{Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti} \times 100\%}{\text{Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar keseluruhan}}$	DinsosP3A
4.	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti} \times 100\%}{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis keseluruhan}}$	DinsosP3A
5.	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	30438	$\frac{\text{Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial} \times 100\%}{\text{Jumlah warga Negara korban bencana keseluruhan}}$	DinsosP3A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja tersebut diinterpretasikan dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 5
Skala Ordinal Interpretasi Pengukuran Kinerja

NO	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	Predikat/Kategori
1	> 100 %	Sangat berhasil
2	90 < s.d < 100	Berhasil
3	80 < s.d < 90	Cukup berhasil
4	70 < s.d < 80	Kurang berhasil

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 11 menyatakan bahwa setiap perangkat daerah harus melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala per triwulan dan tahunan. Berdasarkan aturan dimaksud, telah dilaksanakan pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6
Capaian Kinerja Utama DinsosP3A Triwulan I,II,III,IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Pertriwulan tahun 2025				Total Realisasi	%	Interprestasi
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	6					7	8	
01.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	48.17				47,79	47,79	99,21	Berhasil
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Angka	2	1	1		1,7	3,7	54,05	Tidak Berhasil
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	%	Nindy (701-800)				Mad ya (601-700)	Madya (601-700)	87.5	Cukup Berhasil
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	%	91	20	35	20	15	91	100	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	%	53	10	10	15	18	53	100	Sangat Berhasil

6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	20	20	30	30	100	100	Berhasil
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	20	20	30	30	100	100	Berhasil
08	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Huruf	A (80,30)			A		A (80,15)	89,98	Cukup Berhasil

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman atau disingkat dengan DINSOSP3A mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.379.565.779,- dan realisasi sebesar Rp. 4.598.572.093,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 780.993.686,- dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

KODE REKENING	URAIAN	Anggaran	Realisasi Keuangan 2025	Sisa Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
5	BELANJA	5.379.565.779	4.598.572.093	Rp780.993.686	85,48
5.1	BELANJA OPERASI	5.379.565.779	4.598.572.093	Rp780.993.686	85,48
5.1.01	Belanja Pegawai	3.143.375.779	2.989.046.863	Rp154.328.916	95,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.215.190.000	1.588.525.230	Rp626.664.770	71,71
5.1	Belanja Hibah	21.000.000	21.000.000	Rp -	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.000.000	21.000.000	Rp -	100,00
5.2	BELANJA MODAL	0	0	0	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	Rp -	-
SURPLUS/DEFISIT				Rp780.993.686	
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN					

C. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PER SASARAN PROGRAM

Sasaran Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman ada 9 Sasaran Program dan semua dapat mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Satuan	Target Indikator 2025	Realisasi				Total	Sumber
								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	1. Kesadaran dan Pengetahuan tentang Hak-Hak Perempuan: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan. 2. Peningkatan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan. 3. Peningkatan Jaringan dan Koneksi: Meningkatkan jaringan dan koneksi yang dapat membantu perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.	1. Diskriminasi: diskriminasi terhadap perempuan yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan. 2. Keterbatasan Akses ke Sumber Daya: Keterbatasan akses ke sumber daya seperti keuangan, teknologi, dan informasi yang dapat membantu perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. 3. Kurangnya Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat: Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat yang dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan. 4. Kebijakan dan Peraturan yang Diskriminatif: Kebijakan dan peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan.	Angka	48,17				47,79	47,79	BPS Prov. Sumbar

2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Meningkatnya Advokasi dan Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan.	1. Adanya Dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan advokasi dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. 2. Terjalannya Kerja Sama dengan Organisasi Lain, seperti organisasi non-pemerintah dan Kementrian-PPPA, untuk meningkatkan advokasi dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. 3. Adanya ketersediaan anggaran walau masih kurang.	1. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan. 3. Keterbatasan akses ke sumber daya seperti keuangan, teknologi, dan informasi yang dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Angka	2	1	1		1,7	3,7	DinsosP3A
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Advokasi dan Perlindungan Khusus Anak	1. Adanya Komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan advokasi dan perlindungan khusus anak. 2. Terjalannya Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan Kementrian PPPA untuk meningkatkan advokasi dan perlindungan khusus anak. 3. Akses ke sumber	1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan khusus yang mereka butuhkan. 2. Keterbatasan sumber daya seperti keuangan, teknologi, dan informasi untuk meningkatkan advokasi dan perlindungan khusus anak. 3. Nilai-nilai budaya yang tidak mendukung advokasi dan perlindungan khusus anak	Nilai	Nindy a (701-800)				Mad ya (601 - 700)	Mady a (601-700)	DinsosP3A

				daya seperti keuangan walau masih belum memadai untuk meningkatkan advokasi dan perlindungan khusus anak.									
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Adanya komitmen PSKS dalam mendukung Program dan kegiatan yg ada pada DINSOSP3A 2. Komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan pengembangan potensi PSKS. 3. Terjalannya Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan Kemensos-RI untuk meningkatkan pengembangan potensi PSKS.	1. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan PSKS untuk mengembangkan potensi mereka. 2. Belum optimalnya pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pekerja sosial masyarakat (PSM) 3. Keterbatasan sumberdaya dan anggaran	%	91	20	35	20	15	91	DinsosP3A

5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan sebagai Objek Studi dan Ziarah	1. Adanya Komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.2. Adanya Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan nilai kepahlawanan yang dapat meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.3. Adanya ketersediaan anggaran walaupun masih kurang	1. Keterbatasan sistem dan mekanisme yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.2. Keterbatasan anggaran untuk membantu kesejahteraan Legion Veteran	%	53	10	10	15	15	53	DinsosP3A
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Adanya komitmen dari kepala OPD, Sekretaris, Kabid dan Fungsional tertentu membantu melengkapi data	1. Keterbatasan sumber daya seperti keuangan, teknologi, dan informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola.	Huruf	A (80,30)			A		A (80,15)	Inspektorat

7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan dasar Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar, Gelandang an dan Pengemis	1. Komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. 2. Adanya Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelayanan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. 3. Terlalinnya kerjasama antara Perangkat Daerah lainnya dan dukungan dari Kemensos-RI	1. Keterbatasan sumber daya seperti keuangan, teknologi, dan informasi untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. 2. Keterbatasan akses ke informasi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar bagi PPKS dan kelompok rentan.	%	100	20	20	30	30	100	DinsosP3A
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Meningkatnya Sumber Daya Layanan Bantuan Sosial Korban Bencana	1. Adanya Komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya layanan bantuan sosial korban bencana. 2. Adanya Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan layanan bantuan sosial korban bencana. 3. Terjalinnya kerjasama yang baik antara perangkat daerah dan Kemensos-RI	1. Keterbatasan sistem dan mekanisme yang efektif untuk meningkatkan sumber daya layanan bantuan sosial korban bencana. 2. Keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dapat membantu meningkatkan layanan bantuan sosial korban bencana.	%	100	20	20	30	30	100	DinsosP3A

				dalam hal kebencanaan									
			Meningka tkan PPKS yang menerima Perlindun gan dan Bantuan Jaminan Sosial	1. Adanya Komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. 2. Terjalinnya Kerja sama dengan organisasi non- pemerintah dan Kemensos-RI untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. 3. ketersediaan anggaran walau masih kurang	1. Keterbatasan sumber daya seperti keuangan, teknologi, SDM dan informasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS.								

D. EFISIENSI SUMBER DAYA PER SASARAN PROGRAM

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan memperoleh PAGU sebesar **Rp.1.332.405.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.908.659.836,-** dengan persentase sebesar 68,20%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp.423.745.864,- atau 31,80%.

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (x100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,21	89,42	9,79
2	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	54,05		54,05
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	87,50	96,5	9
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	100	92,29	7,71
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	100	99,57	0,43
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	93,63	6,37
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	79,45	20,55%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	89,98%	93,25	3,27

E. RAPAT EVALUASI KINERJA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam melaksanakan Tupoksi selalu menyasar PPKS, PSKS, Pemberdayaan Perempuan dan melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan serta dijabarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat wajib. Dimana program, kegiatan dan sub kegiatan itu akan menjawab Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sesuai dengan target dan sasaran yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan sesuai juga dengan sasaran strategis yang diemban DINSOSP3A. Untuk itu DINSOSP3A selalu mengadakan evaluasi kinerja setiap bulannya agar bisa melihat progres dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pada rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman . Pada setiap bulannya tahun anggaran 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 8 Januari 2025

Tempat : Ruang Aula Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

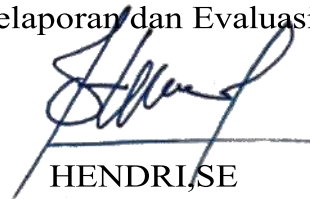
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
2. Kabid Rehabilitasi Sosial
3. Kabid Pemberdayaan Perempuan
4. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
7. Analis Keuangan
8. Jabatan Fungsional Tertentu lainnya

Hasi Rapat :

1. Anggaran terkait Sasaran Strategis Kinerja DINSOSP3A sudah tersedia
2. Rencana Aksi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah dibuat.
3. Rapat dengan seluruh pegawai terkait sasaran dan kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Sasaran Strtegis yang ada di Renstra DinsosP3A 2025-2030.
4. Perjanjian Kinerja Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 telah selesai dibuat.
5. DPA Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 telah selesai.
6. Rencana Anggaran Kas tahun 2025 telah selesai dibuat.
7. Laporan realisasi kinerja sesuai sasaran Strategis tahun 2024 sedang dikerjakan
8. Laporan Realisasi keuangan sesuai sasaran Strategis DinsosP3A tahun 2024 sedang dikerjakan.

Notulis,
Fungsional Perencana,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE

NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/ 022./DinsosP3A/I/2025
Sifat :-
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 8 Januari 2025

Kepada Yth:
Kabid, Kasubag, JFT dan Staf
Di Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. Padang Pariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi Kinerja IKU tahun 2024 dan Rencana Kerja IKU tahun 2025 yang akan dituangkan pada Rencana Aksi tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS
SULATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN JANUARI 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Januari 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	3%	1.. Persiapan Sosialisasi dan Advokasi PUG dan PPRG pada Lembaga Pemerintah	Belum ada Pencairan anggaran tahun 2025	Terintegrasinya Program Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mendukung kegiatan ini
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0	Persiapan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum ada Pencairan anggaran tahun 2025	Terintegrasinya Program Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mendukung kegiatan ini
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	0	Membentuk Tim Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati	Mutasi jabatan Tim Gugus Tugas menjadi kendala dalam memberikan pemahaman tentang keberlanjutan kebijakan KLA	Melaksanakan Rapat Tim Gugus Tugas KLA dan Sosialisasi KHA kepada Tim Gugus Tugas KLA
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	3%	Persiapan Rapat evaluasi kinerja TSKS, penggantian dan rekrutmen TSKS	1. Belum semua TSKS punya sertifikasi dan minimnya tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka dengan Tupoksi TSKS. 2. Rendah nya kesejahteraan yang mereka terima sehingga tidak sesuai dengan kinerja mereka di lapangan.	1. Secara bertahap TSKS akan dilakukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dan peningkatan kapasitas untuk semua TSKS. 2. Selain Tali Asih yang mereka terima dari Kementerian sosial dari anggaran DPA Dinsos P3A juga ada penambahan penghasilan mereka tiap bulan melalui sspd dalam kecamatan sebanyak 400 ribu tiap bulan.
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0	1. Telah dilakukannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2024 dan Dokumen SAKIP 2025 lainnya, 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial tahun 2024 3. Laporan LPPD tahun 2024	Kesulitan dalam merekap data	Adanya komitmen dari kepala OPD, Sekretaris, Kabid dan Fungsional tertentu membantu melengkapi data
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3%	Persiapan pendataan penerima bantuan Perumahan untuk Disabilitas terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	Belum terakomodirnya seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar untuk penerima bantuan perumahan	Diupayakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang belum ditampung melalui dana APBD untuk di upayakan melalui Kementerian sosial RI.
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	3%	Telah dilakukan penyaluran bantuan korban bencana alam dan sosial.	Anggaran yang belum ditetapkan dalam DPA menyebabkan kendala biaya operasional Dapur Umum (Pembelian Isi Tabung Gas)	Kas TAGANA digunakan dan diganti kemudian hari setelah anggaran ditetapkan.





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 6 Februari 2025

Tempat : Ruangan Aula Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.
1. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
2. Kabid Rehabilitasi Sosial
3. Kabid Pemberdayaan Perempuan
4. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
7. Analis Keuangan
8. Jabatan Fungsional Tertentu lainnya
9. Staf swakelola

Hasil Rapat :

1. Rencana Aksi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sudah dibuat.
2. Rapat dengan seluruh pegawai terkait sasaran dan kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Sasaran Strtegis yang ada di Renstra DinsosP3A 2021-2026.
3. Perjanjian Kinerja Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 telah selesai dibuat.
4. Capaian Sasaran strategis “Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan” Masih 0 % masih dalam persiapan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak” telah melakukan penjangkauan kasus.
6. Capaian sasaran strategis ”Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” telah melakukan rapat koordinasi dengan PSKS seperti TKSK, PSM, TAGANA .
7. Perjanjian Kinerja Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 telah dikerjakan
8. Laporan realisasi kinerja sesuai sasaran Strategis bulan Januari tahun 2024 sedang dikerjakan
9. Laporan Realisasi keuangan sesuai sasaran Strategis DinsosP3A tahun 2024 sedang dikerjakan.

Notulis,
Fungsional Perencana,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE

NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/048/DinsosP3A/II/2025
Sifat :-
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 6 Februari 2025

Kepada Yth:
Kabid, Kasubag, JFT dan Staf
Di Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. Padang Pariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi Kinerja IKU bulan Januari dan Persiapan kinerja bulan Februari tahun 2025 yang ada pada Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana aksi tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS

SUHATMAN, S.Pd. M.Si

NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN FEBRUARI 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Februari 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	7%	Terlaksananya Bimtek PUG dan PPRG sebanyak 149 orang peserta	Masih ada Perangkat daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk untuk kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Terintegrasinya Program Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mendukung kegiatan ini
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0	1. Persiapan Sosialisasi Perlindungan bentuk kekerasan terhadap perempuan pada Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.	Belum ada Pencairan anggaran tahun 2025	Terintegrasinya Program Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mendukung kegiatan ini
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA (0)	1. Persiapan rapat tim gugus tugas KLA Kabupaten Layak Anak 2. Capaian kinerja 3%	Belum ada Pencairan anggaran tahun 2024	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	7%	Persiapan Rapat evaluasi kinerja TKSK, penggantian dan rekrutmen TKSK	Belum optimalnya pembinaan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pekerja sosial masyarakat (PSM)	Adanya komitmen PSKS dalam mendukung Program dan kegiatan yg ada pada DINSOSP3A
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	7%	Pendataan Legion Veteran tahun 2023 yang akan menerima bantuan tali asih		Adanya dukungan dan bantuan dari PSKS dalam melakukan pendataan
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0	○ Persiapan penilaian Dokumen SAKIP tahun 2024 ○ Evaluasi Dokumen LPPD tahun 2024	Kesulitan dalam melakukan pengumpulan data	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	7	Penanganan Gelandangan dan Penemis (Gepeng) warga Kabupaten Padang Pariaman An. Maria Kontesa se Keluarga yang melaksanakan aktifitas Gepeng di Kabupaten Pasaman Barat	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) An. Maria Kontesa melaksanakan aktifitas di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan keselamatan yang bersangkutan	Telah dilakukan upaya penjemputan Gepeng tersebut untuk dipulangkan kepada keluarga untuk dilakukan pembinaan selanjutnya, agar Gepeng tersebut tidak melakukan aktifitas mengemis lagi
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	7	Persiapan Pertemuan P2K2 dengan KPM penerima PKH	Anggaran yang belum bisa dicairkan namun ditetapkan dalam DPA menyebabkan kendala dalam transportasi	Menunggu Anggaran ditetapkan untuk mengganti biaya transportasi





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Maret 2025

Tempat : Ruang Aula Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

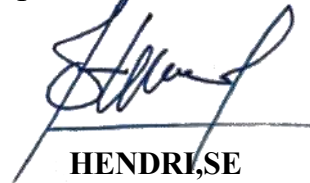
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan
Penanganan fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. Jabatan Fungsional Tertentu lainnya
10. JFT lainnya
11. Staf swakelola

Hasil Rapat

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 10% .
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan perlindungan perempuan telah mencapai 15%
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis ” Meningkatkan Pembangunan Berbasis Hak Anak ” penilaian kabupaten Layak Anak dalam tahap persiapan
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 10%
5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 20%
6. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ” dengan melakukan Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 15 %
7. Sasaran Strategis ”Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial” dengan melakukan Penyaluran bantuan bencana Alam dan Sosial 30% dan Monitoring kepada Penerima PKH
8. Segera melakukan Revisi Rencana Aksi tahun 2025 DinsosP3A telah selesai dibuat dan sudah Reviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
9. Segera melakukan Revisi Perjanjian Kinerja Dinsosp3A 2025 telah selesai dibuat dan sedang dalam Reviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI SE

NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/ 65./DinsosP3A/III/2025
Sifat :-
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 13 Maret 2025
Kepada Yth:
Kabid, Kasubag, JFT dan Staf
Di Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. Padang Pariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Maret 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Diruangan Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi Kinerja IKU semester I tahun yang ada pada Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Aksi 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS


SUHATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN MARET 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Maret 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	Persiapan pelatihan Usaha bagi kelompok Perempuan Kepala Keluarga	Keterbatasan anggaran setiap kelompok hanya diwakili oleh 1 orang dari 35 kelompok	Meminta dukungan dari pengusaha besar untuk ikut membantu
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0	Persiapan Sosialisasi & Advokasi Pembentukan PATBM Nagari	Belum Semua Pemerintah Nagari yang membuat kebijakan program/kegiatan terkait perlindungan Perempuan dan Anak	Advokasi Pemerintah Nagari untuk membentuk PATBM Nagari
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA (0)	Persiapan Penilaian Evaluasi KLA oleh KemenPPA	kurangnya SDM bidang PPA	Membentuk Tim Persiapan penilaian mandiri KLA
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	10%	Persiapan pendataan PPKS yang akan menerima bantuan permakanan LKKS	Menjelang bulan puasa dan Lebaran Idul fitri masyarakat membutuhkan bahan bahan makanan yang cukup banyak, terutama bagi warga kurang mampu	Diberi bantuan untuk warga kurang mampu utk 17 kecamatan berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, mie, gula, minyak makan, telur dan the kotak
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0	Evaluasi Dokumen SAKIP 2024 dan 2025	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
6	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10%	Pelaksanaan Assesment, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Atensi Kalaster Anak, Lansia dan Disabilitas Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI	Pelaksanaan Assesment, Verifikasi dan Validasi tidak berjalan optimal karena data yang divalidasi 435 PPKS sedangkan Petugas Hanya 17 Orang dengan waktu hanya 6 hari	Telah dilakukan upaya penambahan waktu pelaksanaan Assesment, Verifikasi dan Validasi
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	10%	Pertemuan P2K2 dengan KPM PKH dan didampingi oleh 51 orang Pendamping PKH dalam memberikan sosialisasi penggunaan bantuan PKH	Belum semua KPM penerima PKH yang ikut dalam kegiatan	Pendamping PKH dan tim dari DinsosP3A agar lebih aktif lagi untuk dapat membujuk seluruh KPM PKH ikut dalam kegiatan P2K2





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

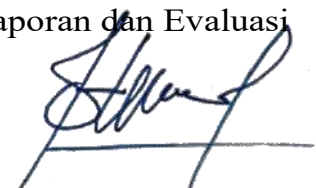
NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Senin / 7 April 2025
- Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaasn Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. JFT lainnya
10. Staf Swakekelola

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 28% telah melakukan pendataan bagi perempuan kepala keluarga yang akan mengikuti pelatihan Manajemen Usaha.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan perempuan telah mencapai 20 %
3. Sasaran strategis " Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak " Telah dilakukan pembinaan Nagari dan Kecamatan Layak Anak. Capaian kinerja telah 10%
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mencapai 20%
5. Terkait sasaran strategis "Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)" telah melakukan Persiapan untuk Monitoring Penyaluran BPNT melalui PT. POS bulan Maret capaian kinerja telah 10% sesuai dengan rencana Aksi.
6. Persiapan penyaluran bantuan sembako pada masyarakat miskin sebanyak 150 orang/paket pada 17 Kecamatan.
7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 32%
9. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025 telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
10. Perjanjian Kinerja Dinsosp3A 2025 telah selesai dibuat dan sedang telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
11. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE

NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/ 086.a /DinsosP3A/IV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 7 April 2025

Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT,
Kasubag dan Staf Di
Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Senin
Tanggal : 7 April 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU Triwulan I yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana aksi tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS**
SULATMAN, S.Pd. M.Si

NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN APRIL 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan April 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	13%	Pelatihan Managemen Usaha bagi kelompok Perempuan Kepala Keluarga sebanyak 35 orang	Keterbatasan anggaran setiap kelompok hanya diwakili oleh 1 orang sementara setiap kelompok beranggotakan 20 orang dari 35 kelompok	Meminta dukungan dari Pokir Anggota Dewan dan Dunia Usaha
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	1	Sosialisasi & Advokasi Pembentukan PATBM Nagari	Belum Semua Pemerintah Nagari yang membuat kebijakan program/kegiatan terkait perlindungan Perempuan dan Anak	Advokasi Pemerintah Nagari untuk membentuk PATBM Nagari
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	0	Pemenuhan Indikator KLA dalam rangka Penilaian Mandiri KLA (input indikator KLA)	Pengumpulan Data pada OPD terkait mengalami kendala karena dokumentasi program kegiatan yang berbasis hak anak tidak tersimpan dengan baik	Kepala Dinas bersama Tim melakukan audiensi dan koordinasi dengan kepala OPD terkait untuk penyediaan Data
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	13%	Pelaksanaan bantuan permakanan LKKS	Menjelang bulan puasa dan Lebaran Idul fitri masyarakat membutuhkan bahan bahan makanan yang cukup banyak, terutama bagi warga kurang mampu	Diberi bantuan untuk warga kurang mampu utk 17 kecamatan berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, mie, gula, minyak makan, telur dan the kotak
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	13%	Persiapan bantuan tali asih untuk LVRI	Bauyaknya data dan kelengkapan adm veteran yang tidak lengkap.	Dilakukan pendataan ke nagari nagari untuk memastikan kondisi anggota LVRI. Membuat kan SK untuk veteran tersebut
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0	Merekap RKA terkait anggaran pergeseran tahun 2025	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	13%	Pelaksanaan Assesment, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Atensi Kalaster Anak, Lansia dan Disabilitas Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI	Pelaksanaan Assesment, Verifikasi dan Validasi tidak berjalan optimal karena data yang divalidasi 435 PPKS sedangkan Petugas Hanya 17 Orang dengan waktu hanya 6 hari	Telah dilakukan upaya penambahan waktu pelaksanaan Assesment, Verifikasi dan Validasi
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	13%	Monitoring bantuan PKH	Masih ada KPM PKH yang menggunakan uang bantuan belum sesuai arahan penggunaannya	Meningkatkan sosialisasi penggunaan bantuan PKH melalui pertemuan P2K2





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa /13 Mei 2025

Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

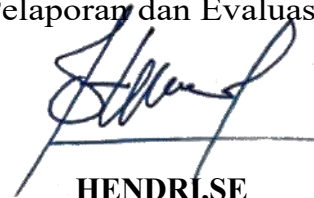
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. JFT lainnya
10. Staf Swakekelola

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 35% telah melakukan pendataan bagi perempuan kepala keluarga yang akan mengikuti pelatihan Manajemen Usaha.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan perempuan telah mencapai 40 %
3. Sasaran strategis "Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak" Telah dilakukan pembinaan Nagari dan Kecamatan Layak Anak. Capaian kinerja telah 28%
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mencapai 30%
5. Terkait sasaran strategis "Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)" telah melakukan Persiapan untuk Monitoring Penyaluran BPNT melalui PT. POS bulan April capaian kinerja telah 35% sesuai dengan rencana Aksi.
6. Persiapan penyaluran bantuan sembako pada masyarakat miskin sebanyak 150 orang/paket pada 17 Kecamatan.
7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 45%.
8. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025 telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
9. Perjanjian Kinerja Dinsosp3A 2025 telah selesai dibuat dan sedang direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
10. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/ 086.a /DinsosP3A/IV/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 13 Mei 2025

Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT,
Kasubag dan Staf Di
Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Mei 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU Triwulan I yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana aksi tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS



SUHATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN MEI 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Mei 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	16%	Melakukan monitoring terhadap Perempuan kepala keluarga yang telah mendapatkan pelatihan manajemen usaha	Masih ada beberapa Perempuan kepala keluarga yang belum bisa mengembangkan usahanya dikarenakan turunya daya beli masyarakat dan modal yang terbatas	Meminta bantuan pendanaan dari dunia usaha dan Pokir anggota dewan
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	1	Menerima Pengaduan Perempuan Berhadapan dengan Hukum karena dilaporkan oleh Suami sendiri ke Polisi	Tidak dapat diproses karena Dinas PPA tidak memiliki anggaran Bantuan Hukum Pengacara	Memerlukan Rujukan Layanan ke UPTD PPA Propinsi Sumbar
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	0	verifikasi dan penilaian KLA tingkat propinsi	turunnya nilai evaluasi mandiri setelah di verifikasi oleh Tim Tingkat Propinsi	Melakukan Perbaikan Data dan Pemenuhan Data yang belum lengkap
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	30%	Pelaksanaan Bimtek Verval DTKS ke Kecamatan di Padang Pariaman	Banyak nya operator DTKS yang tidak paham dalam pengoperasian aplikasi SIKS-NG	Dengan adanya bintek diharapkan seluruh operator DTKS paham dan mampu dalam menjalankan aplikasi tersebut
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	16%	Persiapan bantuan tali asih untuk LVRI	Bauyaknya data dan kelengkapan adm veteran yang tidak lengkap.	Dilakukan pendataan ke nagari nagari untuk memastikan kondisi anggota LVRI. Membuat kan SK untuk veteran tersebut
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0	- o Evaluasi Dokumen SAKIP 2024 - o Melakuakn pengimputan anggaran pergeseran tahun 2024	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	30%	Pelaksanaan Respon Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) An. Annisa di Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	ODGJ adalah keluarga miskin dan tinggal dengan nenek sehingga sulit untuk melakukan rujukan	Permasalahan ODGJ telah direspon oleh Ibuk Bupati, Dinas Sosial P3A, dan Dinas Kesehatean dengan merujuk ke RSJ HB. Saanin Padang.
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	30%	Telah dilakukan penyaluran bantuankorban benana alam dan sosial.	Tempat Pemesanan stok bantuan tidak terdaftar dalam e-katalog	Mencari tempat baru yang telah terdaftar dalam e-katalog untuk kerja sama





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

NOTULEN RAPAT

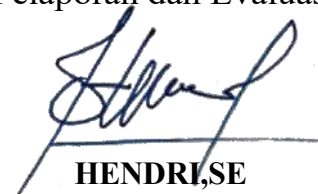
- Hari / Tanggal : Kamis /5 Juni 2025
- Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. JFT lainnya
10. Staf Swakekelola

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 19% .
2. Segera lakukan persiapan monitoring dan Evaluasi GAB/GBS tahun 2025 dan implementasi tahun 2024.
3. Melakukan pengumpulan data ke seluruh OPD terkait persiapan APE (Anugerah Parahita Eka Praya) tahun 2025
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan perempuan telah mencapai 23 %
5. Telah dilakukan respon kasus kekerasan seksual terhadap anak
6. Terkait sasaran Strategis "Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak " Telah dilaksanakan Bimtek tahap 2 Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat TK/PAUD/KB. SD, dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman.Telah dilaksanakan Bimtek Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat TK/PAUD/KB. SD, dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman.
7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 20%
8. Persiapan untuk Monitoring Penyaluran BPNT melalui PT. POS bulan
9. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 45%
10. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025 telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
11. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.
12. Terkait sasaran "Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" Capaian kinerja dalam penanganan Disabilitas, Lansia, anak terlantar telah 30 %
13. Terkait sasaran "Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" Melakukan pendataan Anak terlantar yang akan menerima bantuan Permakanan dan Sandang
14. Terkait sasaran " Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial " telah dilakukan Persiapan Monitoring Penerima PKH dan Capaian kinerja dalam penanganan kebencanaan telah 45%

Notulis,

Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/ 098.a /DinsosP3A/VI/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 5 Juni 2025
Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT,
Kasubag dan Staf Di
Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Juni 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi kinerja bulan Mei yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana aksi tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS

SULATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN JUNI 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Juni 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	24,80%	Merekap data realisasi GAB-GBS tahun 2025	Masih ada beberapa Perangkat daerah yang belum menyampaikan laporanrealisasi GAB-GBS	Terus melakukan kontak dengan perangkat daerah yang belum melaporkan realisasi GAB-GBS tahun 2025
				Pelaporan laporan B06 periode Juni 2025	Keterbatasan waktu pengimputan	Waktu pengimputan laporan B06 diperpanjang
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0	menerima pengaduan dari perempuan yang dilaporkan oleh selingkuhan suaminya karena melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur (selingkuhan suami)	Tidak dapat diproses karena Dinas PPA tidak memiliki anggaran Bantuan Hukum Pengacara	Memerlukan Rujukan Layanan ke UPTD PPA Propinsi Sumbar
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700	Penilaian Lapangan secara Daring oleh Tim penilai Tingkat Kementerian PPA	Tidak semua kepala OPD memahami indikator KLA saat tanya jawab	Sosialisasi KLA dan Penyusunan RAD KLA
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	40%	Pelaksanaan Bimtek Peningkatan kapasitas SDM PSM se Padang Pariaman	SDM PSM banyak yang baru sehingga belum memahami tupoksi PSM. Hal ini menyulitkan mereka dalam melaksanakan tugas tugas di masyarakat.	Setelah diadakannya bimtek ini diharapkan SDM PSM bisa dan mampu utk menjalankan tugasnya di masyarakat.
				Pengukuhan dan penyerahan SK koordinator TKSK Padang Pariaman.	Belum dikuukuhkan dan belum diserahkan nya SK Koordinator TKSK padang pariaman.	Pengukuhan dan Penyerahan Sk Koordinator TKSK sudah dilaksanakan dan dipimpin oleh ibu Kadinsos P3A Padang Pariaman.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	20%	Persiapan bantuan tali asih untuk LVRI	Bauyaknya data dan kelengkapan adm veteran yang tidak lengkap.	Dilakukan pendataan ke nagari nagari untuk memastikan kondisi anggota LVRI. Membuat kan SK untuk veteran tersebut
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	Evaluasi Dokumen SAKIP tahun 2024	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu

7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	40%	Respon Kasus Lansia terlantar ditemukan di Rumah Makan Kiambang Raya Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, lalu diantar ke Satpol PP dan DamkarKabupaten Padang Pariaman,	Lansia terlantar dilaporkan oleh Sat Pol PP dan Damkar ditemukan di depan Rumah Makan Kiambang Raya Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, dalam kondisi lemah dan sulit untuk berjalan	Lansia terlantar telah difailitasi untuk dipulangkan ke Keluarga yang beralamat di Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	40%	Telah dilakukan penyaluran bantuan korban bencana alam dan sosial.	Belum tercapai kesepakatan harga barang yang sesuai kebutuhan stok bencana dengan kualitas dan harga yang sesuai dengan standar harga pada DPA	Melakukan lobby dengan pemilik toko untuk mencapai kesepakatan harga





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Kamis / 10 Juli 2025
- Tempat : Ruang Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. JFT lainnya

Hasil Rapat :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 35% .
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan perempuan telah mencapai 40 %
- c. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 33%
- d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 35%
- e. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025 telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
- f. Terkait sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 45 %
- g. Sasaran Strategis ” Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial “ telah disalurkan bantuan bencana Alam dan Sosial 60% dan Monitoring kepada Penerima PKH
- h. Perjanjian Kinerja Dinsosp3A 2025 telah selesai dibuat dan sedang telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
- i. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/139.a/DinsosP3A/VII/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 10 Juli 2025

Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT,
Kasubag dan Staf Di
Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juli 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Ruang Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU Triwulan II yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS



SUHATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN JULI 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Juli 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kestaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	27,80%	Merekap data GAB-GBS tahun 2025	Masih ada beberapa Perangkat daerah yang belum menyampaikan laporan GAB-GBS tahun 2025	Terus melakukan kontak dengan perangkat daerah yang belum melaporkan GAB-GBS tahun 2025
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	2	Persiapan membentuk Tim pelaksana kegiatan Bimtek Maanajemen Kasus bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kekurangan SDM	Meminta Tambahan Tim dari Bidang Lainnya
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700	Terlaksananya pendampingan dalam Penilaian Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak(PISA) sebagai salah satu upaya Pemenuhan Hak Informasi Anak untuk mewujudkan KLA	SDM Pengelola Pusataka Daerah masih minim dalam Pengisian Borang Penilaian Standarisasi PISA.	Advokasi SDM Pengelola Pusataka daerah dan Taman Bacaan Masyarakat untuk memenuhi Standarisasi PISA
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	50%	Melakukan kunjungan ke STPL Bekasi Kementrian Sosial RI bersama Ketua LKKS	Perlunya koordinasi dan kerjasama penanganan masalah sosial antara LKKS Padang Pariaman dengan STPL Bekasi	Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi ini memudshkan LKKS untuk mewujudkan program kerja nya terutama dalam penanganan masalah masalah sosial.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	30%	Persiapan acara tabur bunga dan perawatan taman makam pahlawan	Kekurangan anggaran dalam perbaikan area sekitar makam	tambahan anggaran dari pemerintah dan organisasi sosial lainnya
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	Evaluasi Dokumen SAKIP tahun 2024	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	60%	Penyaluran bantuan Asistensi (Atensi) Kesejahteraan Sosial) dari STPL Bekasi kementerian Sosial RI	Lokasi Penerima bantuan yang sulit dijangkau dengan waktu karena menyebar di seluruh Kabupaten Padang Pariaman	Penyaluran bantuan melibatkan d TKSK dan bantuan didistribusikan langsung ke rumah yang bersangkutan
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	60%	Monitoring Bantuan PKH	Ada beberapa KPM PKH yang belum mendapatkan bantuan	Melakukan koordinasi dengan pihak PT. Pos dan Kemensos RI





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

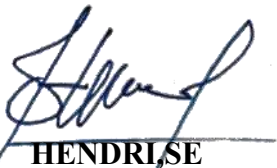
NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Kamis /7 Agustus 2025
- Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
2. Kabid Rehabilitasi Sosial
3. Kabid Pemberdayaan Perempuan
4. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
7. Analis Keuangan
8. JFT lainnya
9. Staf Swakelola

Hasil Rapat :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan” telah mencapai 40% .dan Segera lakukan pengumpulan data ke seluruh OPD terkait persiapan APE (Anugrah Parahita Eka Praya) tahun 2025
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
Meningkatnya perlindungan perempuan telah mencapai 45 %
- c. Terkait sasaran Strategis ” Meningkatkan Pembangunan Berbasis Hak Anak” telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi penyediaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peserta 68 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, kader PKK, Bundo Kanduang dan Pengelola PAUD/TK.
- d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 35% dan telah dilakukannya Monitoring Penyaluran BPNT melalui PT. POS sebanyak 10.372 KPM
- e. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 35%
- f. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi 2025
- g. Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 50 %
- h. Terkait sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” Penyaluran bantuan Permakanan kepada Disabilitas, Anak terlantar, Lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis
- i. Terkait sasaran ” Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial “ Penyaluran bantuan bencana Alam dan Sosial 65% dan Monitoring kepada Penerima PKH
- j. Kadis mengingatkan Rapat Evaluasi Kinerja ini dtetap dilakukan setiap bulannya.
- k. Melakukan monitoring kinerja sesuai SOP yg telah dibuat dan memerintahkan kepala bidang untuk SOP yang baru sesuai dengan Tupoksi bidang masing-masing

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi


HENDRI SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/ 172.a /DinsosP3A/VIII/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 7 Agustus 2025

Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT,
Kasubag dan Staf Di
Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2025

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Di Aula Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman

Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU bulan Juli dan Agustus yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SUHATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN AGUSTUS 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Agustus 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	27,80%	Merekap data GAB-GBS tahun 2025	Masih ada beberapa Perangkat daerah yang belum menyampaikan laporan GAB-GBS tahun 2025	Terus melakukan kontak dengan perangkat daerah yang belum melaporkan GAB-GBS tahun 2025
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	2	Pembentukan Tim pelaksana kegiatan Bimtek Maanajemen Kasus bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kekurangan SDM dan sumber daya	Meminta Tambahan Tim dari Bidang Lainnya
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700	Terlaksananya Sosialisasi & Advokasi Penyediaan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kecamatan dan Nagari	Belum Adanya Layanan Konsultasi, informasi dan Edukasi Bagi Anak/Remaja, Pra-Nikah, dan Keluarga	Advokasi Kecamatan dan Nagari untuk membentuk PUSPAGA Tingkat NAGARI dan KECAMATAN
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	60%	Pengukuhan dan penyerahan SK koordinator TKSK Padang Pariaman telah dilakukan secara simbolis	SK Koordinator TKSK padang pariaman belum diserahkan secara keseluruhan	Pengukuhan dan Penyerahan Sk Koordinator TKSK sudah dilaksanakan dan dipimpin oleh ibu Kadinsos P3A Padang Pariaman.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	32%	Upacara HUT Kemerdekaan RI sekaligus penyerahan Tali Asih Untuk Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Padang Pariaman.	Untuk menghormati jasa pahlawan perlu diberikan Tali Asih untuk para Veteran Padang Pariaman.	Tali Asih sudah diserahkan utk 68 orang veteran sesuai SK Bupati Padang Pariaman dengan nominal 300 ribu per orang.
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	Pembahasan anggaran perubahan tahun 2025 dengan KADIS, Sekdis dan KABID yang akan melakukan perubahan anggaran	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	70%	Respon kasus ODGJ terlantar An. Murni ODGJ terlantar di bawah jembatan ply over Kecamatan Batang Anai.	ODGJ dalam kondisi terlantar, tidak punya nidentitas dan tidak ada yang mengurus sehingga perlu dilakukan penanganan	ODGJ An. Murni telah ditindaklanjuti dengan merujuk yang bersangkutan ke RSJ HB. Saanin Padang
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	70%	Persiapan pendataan penerima bantuan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kesulitan didalam melakukan pendataan karena lokasi yang jauh dan terpencil	Melakukan koordinasi dengan PSKS seperti TKSK, PSM dan TAGANA untuk ikut dalam melakukan pendataan





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

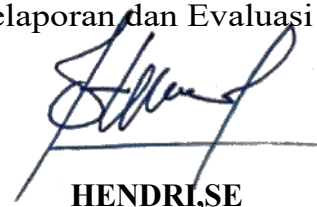
NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Senin / 8 September 2025
- Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. JFT lainnya
10. Staf Swakelola

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 45 % .
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan perlindungan perempuan telah mencapai 70%
3. Capaian Sasaran Strategis ” Meningkatkan Pembangunan Berbasis Hak Anak ” Mewujudkan Kabupaten Layak Anak telah mendapatkan predikat Madya
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 53%
5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 70%
6. Sasaran strategis “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 65 %
7. Terkait sasaran strategis ” Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial ” Penyaluran bantuan bencana Alam dan Sosial 80% dan Monitoring kepada Penerima PKH
8. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025 telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
9. Perjanjian Kinerja Dinsosp3A 2025 telah selesai dibuat dan telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
10. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI,SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096
Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/198.a/DinsosP3A/IX/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 8 September 2025

Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT,
Kasubag dan Staf Di
Lingkungan Dinsos PPPA
Kab. PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Senin
Tanggal : 8 September 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU Triwulan III yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Aksi 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS



SUHATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN SEPTEMBER 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan September 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	34,80%	Pelaporan B09	Keterbatasan waktu sehingga pengimputan kurang maksimal	Penambahn waktu Pengimputan pelaporan B09
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	3	kegiatan Bimtek Maanajemen Kasus bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kekurangan SDM	Meminta Tambahan Tim dari Bidang Lainnya
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700	Terlaksananya Bimtek Puskesmas Ramah Anak dalam upaya pemenuhan hak anak pada lembaga layanan kesehatan masyarakat yang ramah anak	Belum Semua SDM Puskesmas memahami terkait layanan perlindungan khusus anak korban dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	sosialisasi dan advokasi pembentukan pusat layanan kesehatan masyarakat ramah anak. Menetapkan 25 Puskesmas yang ada di Padang pariaman sebagai Puskesmas Yang Ramah Anak
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	70%	Pelaksanaan kegiatan Rakor dan Evaluasi Bansos tahun 2025	Tidak akurat nya data penerima bansos dan metode penyaluran yang tidak tepat, Perlu dilakukan Rapat koordinasi evaluasi dalam pemberian bantuan sosial di kabupaten padang pariaman	Rakor sudah dilaksanakan dan diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran bansos.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	37%	Melakukan kunjungan kerumah anggota Veteran	Masih ada beberapa veteran yang hidup dalam kekurangan	Memberikan santunan dengan nominal yang lebih besar lagi dari yang telah diberikan sebelumnya
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	Melakukan pengimputan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial TW III	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	75%	Persiapan pelaksanaan penyerahan bantuan Permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar dan Lanjut Usia Terlantar	Permasalahan jangkauan penyerahan bantuan, karena lokasi penerima bantuan berjauhan dan menyebar di Kabupaten Padang Pariaman	Penyerahan bantuan dilaksanakan beberapa titik dan bagi yang tidak bisa datang bantuan diantar ke rumah yang bersangkutan
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	75%	Penyeran bantuan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kesulitan didalam melakukan penyerahan bantuan karena lokasi yang jauh dan terpencil	Melakukan koordinasi dengan PSKS seperti TKSK, PSM dan TAGANA untuk ikut dalam melakukan pendataan





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo.com

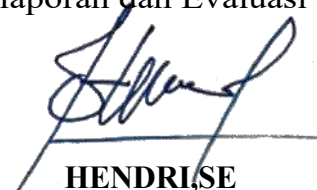
NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Rabu / 8 Oktober 2025
- Tempat : Di Ruang KADIS Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
2. Kabid Rehabilitasi Sosial
3. Kabid Pemberdayaan Perempuan
4. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
7. Analis Keuangan
8. JFT lainnya
9. Staf Swakelola

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 47,79 % serta segera melakukan pengimputan data terkait APE (Anugrah Parahita Eka Praya) tahun 2025
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
Meningkatnya perlindungan perempuan telah mencapai 73%
3. Sasaran strategis ” Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak ” telah mencapai Kabupaten Layak Anak dengan mendapatkan predikat Madya tahun 2023
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 65%
5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 80%
6. Sasaran strategis” Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan melakukan Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 75 %
7. Melakukan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Lansia terlantar, Anak terlantar
8. Sasaran strategis ” Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial “ Penyaluran bantuan bencana Alam dan Sosial 85% dan Monitoring kepada Penerima PKH
10. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025.
11. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinsosp3A 2025 segera dibuat .
12. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI, SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo

Nomor : 050/288.a/DinsosP3A/X/2025

Pariaman, 8 Oktober 2025

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth:

Sekretaris, Kabid, JFT,

Kasubag dan Staf Di

Lingkungan Dinsos PPPA

Kab. Padang Pariaman

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Oktober 2025

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Di Ruang KADIS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman

Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU bulan September dan Oktober yang ada pada Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi tahun 2025.

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS

SUHAITMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN OKTOBER 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Oktober 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	38,80%	Pelaporan B09	Keterbatasan waktu sehingga pengimputan kurang maksimal	Penambahn waktu Pengimputan pelaporan B09
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	3	Persiapan Kegiatan Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bagi Pasutri	Belum Semua Pasangan yang merupakan kelompok rentan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Melakukan Sosialisasi dan edukasi sebagai upaya penyadaran dan pemahaman kepada perempuan tentang perlindungan perempuan dan anak
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700	Terlaksananya Pelantikan Forum Anak Daerah sebagai wadah organisasi partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	Suara Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih dianggap sebagai pemenuhan syarat	peningkatan kapasitas forum anak dan dilibatkan dalam setiap pembangunan.
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	75%	Kegiatan peningkatan kapasitas dan outbound pilar-pilar sosial.	Banyak nya masalah dan kasus serta beban kerja pilar pilar sosial di lapangan yang semakin meningkat, sehingga banyak pilar pilar sosial yang tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab nya	Dengan kegiatan ini diharapkan pilar pilar sosial mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya dan memupuk rasa kebersamaan dengan kegiatan outbound yang diikuti oleh TKSK dan Tagana se Padang Pariaman di Mifan Padang Panjang.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	40%	Persiapan Penyerahan Tali Asih untuk LVRI Padang Pariaman dalam rangka Hari Pahlawan	Kurang nya kesejahteraan para veteran sehingga pemkab memberikan tali asih untuk mereka	Tali asih sudah diserahkan untuk 68 orang veteran dipadag pariaman
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	Merekap RKA anggaran Perubahan tahun 2025	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	85%	Respon Kasus Lanjut Usia Terlantar An. Dahlan di Nagari Parik Malintang	Lansia terlantar dalam kondisi sangat meiskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Permasalahan tersebut telah direspon oleh Dinas Sosial P3A dan Sentra Panggudi Luhur Bekasi dengan memberikan bantuan Kebutuhan Hidup (Sembako) dan kursi roda
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	85%	Telah dilakukan penyaluran bantuan korban bencana alam dan sosial.	Menunggu Tindak Lanjut dari BBPPKS Padang	Mengunjungi langsung BBPPKS Padang untuk menanyakan tindak lanjut dari barang yang rusak





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo.com

NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Selasa / 4 November 2025
- Tempat : Di Ruangan KADIS Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. JFT lainnya
10. Staf Swakelola

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah melakukan monitoring dan Evaluasi GAB/GBS tahun 2025 dan implementasi tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
2. Sasaran "Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan" telah mencapai 85%
Dan persiapan Bimbingan Teknis Manajemen Kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan jumlah peserta 78 orang yang terdiri dari petugas penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di Nagari dan Kecamatan.
3. Segera dibuat SK pemberian Reward Pegawai Terbaik.
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mencapai 80%
5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 85%
6. Sasaran Strategis" Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) " Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 80 %
Dan Melakukan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Lansia terlantar, Anak terlantar
7. Sasaran strategis "Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial " Penyaluran bantuan bencana Alam dan Sosial 90% dan melakukan persiapan Tagana Masuk Sekolah
8. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025.
9. Perjanjian Kinerja Dinsosp3A 2025 telah selesai dibuat .
10. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi



HENDRI, SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo

Nomor : 050/313.a/DinsosP3A/XI/2025

Pariaman, 4 November 2025

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth:

Sekretaris, Kabid, JFT,

Kasubag dan Staf Di

Lingkungan Dinsos PPPA

Kab. Padang Pariaman

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 November 2025

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman

Acara : Rapat Evaluasi Kinerja IKU bulan September dan Oktober yang ada pada Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS

SUHATMAN, S.Pd. M.Si

NIP. 19800419 200501 1 008

EVALUASI BULAN NOVEMBER 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan November 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	40,80%	Merekap Laporan GAB-GBS tahun 2024	Masih ada perangkat daerah yang belum melaporkan GAB-GBS tahun 2025	Terus melakukan kontak dengan Perangkat Daerah terkait yang belum melaporkan GAB-GBS tahun 2025
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	3	Melakukan Sosialisasi kemasyarakat dinagari tentang kekerasan di rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan	Belum Semua masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Melakukan Sosialisasi dan edukasi sebagai upaya penyadaran dan pemahaman kepada perempuan tentang perlindungan perempuan dan anak
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi & Advokasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan sahabat Anak Indonesia (APSAI) sebagai upaya mewujudkan KLA	Belum Semua Perusahaan yang mendapatkan KHA	Sosialisasi KHA dan Penetapan APSAI Tingkat Kabupaten
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	85%	Kegiatan Bimtek Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Banyaknya terjadi Kasus-kasus kekerasan dalam keluarga dan kekerasan terhadap anak serta kasus kasus dalam rumah tangga lainnya.	Bimtek ini diharapkan mampu mencari solusi dan penanganan serta konsultasi masalah keluarga. Binmtek ini diikuti oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, PKK, karang taruna , tokoh agama dan perangkat nagari se padang pariaman.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	43%	Penyerahan Tali Asih untuk LVRI Padang Pariaman dalam rangka Hari Pahlawan	Kurang nya kesejahteraan para veteran sehingga pemkab memberikan tali asih untuk mereka	Tali asih sudah diserahkan untuk 68 orang veteran dipadag pariaman sekaligus upacara hari pahlawan
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	o Merekap data SPM tahun TW III 2025 o Melakukan Pengimputan Anggaran Perubahan tahun 2025	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	Melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar	Penerima bantuan terkendala dengan kondisi lapangan dan tidak seluruhnya bisa datang ke tempat pendistribusian kanrena lokasi yang berjauhan	Penyerahan bantuan dilaksanakan di beberapa titik dan bagi yang tidak bisa datang bantuan diantar ke rumah yang bersangkutan
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95%	Pertemuan P2K2 dengan Penerimaan KPM PKH	Masih ada KPM PKH yang belum paham penggunaan bantuan Program PKH	Kegiatan dilakukan dengan di damping oleh Pendamping PKH dan DINSOSP3A





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo.com

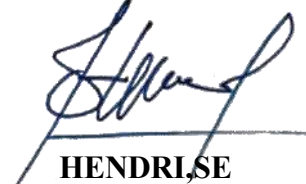
NOTULEN RAPAT

- Hari / Tanggal : Rabu / 10 Desember 2025
- Tempat : Ruang SEKDIS Dinas Sosial P3A
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman
- Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peserta : 1. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Kabid Pemberdayaan sosial dan Penanganan
fakir Miskin
3. Kabid Rehabilitasi Sosial
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan
5. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Fungsional Perencanaan dan Pelaporan
8. Analis Keuangan
9. Pejabat Fungsional Tertentu
10. Staf

Hasil Rapat :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan telah mencapai 47,79 % .
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan telah mencapai 100 %
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak “ telah mendapatkan predikat Madya
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah mencapai 91%
5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah telah mencapai 82%
6. Sasaran strategis “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan melakukan Penanganan Disabilitas, Lansia, Anak terlantar gelandangan, pengemis 100%
7. Sasaran strategis ” Meningkatkan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial ” Penyaluran bantuan bencana Alam dan Sosial 100% dan terus melakukan Monitoring kepada Penerima PKH
8. Program dan kegiatan telah sesuai dengan Renstra 2021-2026 dan Rencana Aksi tahun 2025 telah direviu oleh Inspektorat Kab. Padang Pariaman.
9. Seluruh Pegawai yang ada di DinsosP3A harus selalu meningkatkan disiplin dan patuh pada peraturan yang ada.

Notulis,
Fungsional Perencanaan, Pelaporan dan
Evaluasi



HENDRI,SE
NIP.19760226 200701 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Tuanku Tambusai No. 113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp/Fax : (0751) 4856096

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@gmail.com

Nomor : 050/352.a/DinsosP3A/XII/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Pariaman, 10 Desember 2025

Kepada Yth:
Sekretaris ,Kabid ,JFT, Kasubag dan
Staf Di Lingkungan Dinsos PPPA Kab.
PadangPariaman
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka evaluasi dan monitoring Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Di Ruang Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman
Acara : Rapat evaluasi kinerja IKU Triwulan IV yang ada pada Perjanjian Kinerja serta capaian IKU TW IV tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan pada Bapak/Ibu, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

SEKRETARIS


SUHATMAN, S.Pd. M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

RAPAT EVALUASI BULAN DESEMBER 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	realisasi	Rencana Aksi bulan Desember 2025	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	47,79%	Pelaporan dokumen B012	Waktu pelaporan yang terbatas	Menambah waktu pengimputan B012 supaya pelaporan lebih lengkap
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	3,7	Kegiatan Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bagi Pasutri	Belum Semua Pasangan yang merupakan kelompok rentan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga	Melakukan Sosialisasi dan edukasi sebagai upaya penyadaran dan pemahaman kepada perempuan tentang perlindungan perempuan dan anak
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Hak Anak	Nilai Peringkat Kabupaten Layak Anak	Madya (601-700)	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak dalam melaksanakan peran 2P pelopor perubahan	Belum Semua Nagari dan Kecamatan Membentuk Forum Anak	Advokasi Pembentukan Forum Anak Daerah, kecamatan dan Nagari
4	Meningkatnya Profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi	90%	Kegiatan Rakor dan evaluasi kinerja Dinsos P3A dengan pilar pilar sosial	Kinerja dan beban kerja yang meningkat membuat jajaran Dinsos P3A serta pilar pilar sosial perlu untuk melakukan evaluasi dan rakor untuk perencanaan kegiatan tahun berikutnya.	Dengan kegiatan ini jajaran dinsos P3A diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja yang tinggi serta mampu membina dan mengarahkan pilar pilar sosial melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sungguh sungguh.
4	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Persentase pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	50%			
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A (80,25)	Pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial tahun 2025	Kurangnya tenaga di bagian Perencana dan Evaluasi	Adanya dukungan dari Kepala OPD, Sekretaris dan Fungsional tertentu
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	Pelaksanaan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan kegiatan	Pelaksanaan monitoring mengalami kesulitan karena lokasi yang berjauhan	Pelaksanaan monitoring dilakukan di beberapa lokasi penerima bantuan
8	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	Monitoring penerima bantuan PKH	Keterbatasan anggaran dan sumberdaya	Melakukan koordinasi dengan PT POS Indonesia dan Kementerian Sosial RI



BAB IV PENUTUP

Demikianlah laporan Tahun 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial menunjukkan capaian yang cukup baik, dimana penanganan terhadap penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, serta kelompok rentan lainnya terus ditingkatkan melalui pemberian bantuan sosial berupa permakanan, sandang, serta alat bantu. Selain itu, upaya penurunan jumlah gelandangan dan pengemis juga menunjukkan hasil positif melalui pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial, DinsosP3A turut melaksanakan kegiatan penanganan korban bencana alam maupun sosial. Pemberian bantuan logistik, layanan dukungan psikososial, serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti BPBD dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) telah dilakukan secara optimal guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana.

Selanjutnya, dalam upaya pemberdayaan sosial, peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial terus diperkuat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk mendukung efektivitas pelayanan sosial di tingkat nagari dan kecamatan.

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DinsosP3A melalui UPTD PPA terus memberikan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk layanan pengaduan, pendampingan, serta rujukan. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara umum, realisasi kinerja pada bulan ... Tahun 2025 berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, luasnya wilayah jangkauan pelayanan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus sosial. Namun demikian, melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi secara bertahap.

Ke depan, DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program melalui optimalisasi sumber daya yang ada, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pariaman, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS



SISKA PRIMA DONA, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001